



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM)
UNIT KERJA : SEKRETARIAT UTAMA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : YUDIANTO
2. Jabatan : KEPALA BIRO
3. NHK : 727473

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 3.745.800.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/200 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 1.200.000.000
2. Tanah Seluas 210 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 357.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/21 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 525.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/48 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 475.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 48 m2/43 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 850.000.000
6. Tanah Seluas 24 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDUNG , HASIL SENDIRI Rp. 338.800.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 250.000.000

1. MOBIL, MITSUBISHI XPANDER 1.5 ULTIMATE A/T Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 215.000.000
2. MOTOR, YAMAHA NMAX NON ABS 155 VVA Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 24.500.000
3. MOTOR, HONDA VARIO 125 CBS ISS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 10.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 32.055.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 24.585.352



F. HARTA LAINNYA	Rp.	45.365.051
Sub Total	Rp.	4.097.805.403
III. HUTANG	Rp.	119.325.259
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.978.480.144

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.